SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

HUTANG BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata administrasi keuangan daerah dan pengaturan keadaan kas daerah terdapat Hutang Belanja Perangkat Daerah dikarenakan Penerapan Sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berbasis Akrual yang merupakan Tanggung jawab wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembayaran sesuatu Barang/Jasa dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hutang Belanja Perangkat Dearah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hutang Belanja Perangkat Dearah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/IV.01/2026
TANGGAL : 13 Maret 2026

HUTANG BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Hutang Belanja Jasa Kantor

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Hutang Belanja Air	Hutang Belanja Listrik	Hutang Belanja Telepon	Hutang Belanja Tagihan kawat/faksimili/internet/tv berlangganan	Hutang Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.270,00	2.235.241,50	-	-	
2	Dinas Kesehatan	89.480,00	1.973.168,00	45.407,00	2.964.100,00	
3	RSUD Alimudin Umar	912.600,00	25.819.350,00	528.680,00	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	746.625,00	8.708.521,00	40.207,00	1.523.500,00	
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	268.700,00	872.632,00	50.180,00	2.202.770,00	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.770,00	-	-	-	
7	Dinas Sosial	-	189.372,00	-	962.600,00	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	92.536,00	1.868.327,00	-	1.224.630,00	
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	148.400,00	259.980,50	-	844.660,00	
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	227.075,00	39.907,00	899.110,00	
11	Dinas Lingkungan Hidup	330.648,00	401.892,00	-	1.692.640,00	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.595,00	897.200,00	-	2.019.300,00	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	153.100,00	114.694,00	442.750,00	962.700,00	
14	Dinas Perhubungan	126.055,00	2.137.575,00	-	1.474.200,00	301.823.684,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	61.420,00	1.093.411,00	619.317,00	-	
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	71.960,00	10.612.808,50	67.407,00	1.383.290,00	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.660,00	248.556,00	72.608,00	3.209.130,00	

18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	155.660,00	5.473.864,00	-	-	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	161.000,00	999.560,00	-	-	
20	Dinas Perikanan	211.720,00	654.503,00	-	1.039.540,00	
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	89.480,00	408.614,00	49.907,00	1.271.790,00	
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	358.320,00	3.851.437,00	58.655,00	1.027.200,00	
23	Sekretariat Daerah	2.898.588,00	15.174.337,00	1.173.100,00	374.200,00	
24	Sekretariat DPRD	698.480,00	4.872.004,00	-	7.664.465,00	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.460,00	301.552,00	39.907,00	725.110,00	
26	Badan Pendapatan Daerah	-	1.681.300,00	-	810.990,00	
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	74.200,00	1.088.656,00	267.978,00	1.722.060,00	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	257.792,50	106.807,00	-	
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	803.553,00	703.802,00	586.360,00	490.290,00	
30	Inspektorat Daerah	91.980,00	-	-	-	
31	Kecamatan Sumber Jaya	50.000,00	154.140,00	-	456.490,00	
32	Kecamatan Way Tenong	100.000,00	192.376,00	419.050,00	-	
33	Kecamatan Sekincau	150.000,00	287.500,00	-	1.000.000,00	
34	Kecamatan Belalau	58.920,00	154.250,00	-	-	
35	Kecamatan Batu Brak		49.316,00	-	654.000,00	
36	Kecamatan Balik Bukit		444.069,00	-	1.207.300,00	
37	Kecamatan Sukau	30.770,00	131.478,00	-	432.570,00	
38	Kecamatan Suoh	50.000,00	400.000,00	-	300.000,00	
39	Kecamatan Gedung Surian	50.000,00	190.876,00	-	500.000,00	
40	Kecamatan Kebun Tebu	50.000,00	-	-	450.050,00	
41	Kecamatan Air Hitam	100.000,00	-	-	-	
42	Kecamatan Pagar Dewa	100.000,00	-	-	-	
43	Kecamatan Batu Ketulis	50.000,00	400.000,00	300.000,00	-	
44	Kecamatan Bandar Negeri Suoh		-	-	-	
45	Kecamatan Lumbok Seminung	50.000,00	-	-	-	
46	Badan Kesatuan	89.480,00	140.419,00	41.650,00	976.040,00	
Jumlah		9.781.430,00	95.671.649,00	4.949.877,00	42.464.725,00	301.823.684,00

2. Hutang Belanja Pegawai

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Hutang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Hutang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	Hutang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Hutang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.053.499.769,00	3.217.575.908,00	588.250.000,00	429.500.000,00	
2	Badan Pendapatan Daerah					5.365.000,00
Jumlah		13.053.499.769,00	3.217.575.908,00	588.250.000,00	429.500.000,00	5.365.000,00

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Hutang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Hutang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.636.585.124,00	738.206.540,00		
2	Kecamatan Bandar Negeri Suoh			8.987.800,00	
3	Kecamatan Way Tenong			32.770.000,00	
4	Kecamatan Sukau				5.416.000,00
5	Kecamatan Batu Ketulis				4.686.000,00
Jumlah		2.636.585.124,00	738.206.540,00	41.757.800,00	10.102.000,00

3. Belanja Barang dan Jasa BLUD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD
1	RSUD Alimudin Umar	5.992.320.165,00
Jumlah		5.992.320.165,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS